

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**



**OLEH:**

**TRI WULANDARI**

**NIM: 18.2300.081**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL DINAS SOSIAL  
PEMERINTAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**



**OLEH**

**TRI WULANDARI  
NIM. 18.2300.081**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

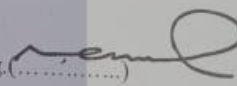

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial  
Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare  
(Analisis Manajemen Syariah)  
Nama Mahasiswa : Tri Wulandari  
NIM : 18.2300.081  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.3693/In.39.8/PP.00.9/9/2021

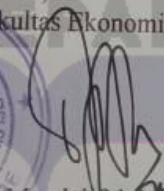
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.   
NIP : 19730129 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.   
NIP : 19700627 200501 1 005

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

**PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial  
 Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare  
 (Analisis Manajemen Syariah)

Nama Mahasiswa : Tri Wulandari

NIM : 18.2300.081

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
 B.3693/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

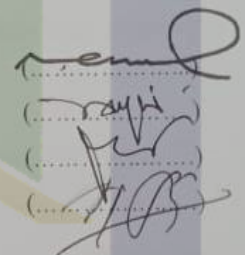
Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th. I. (Sekertaris)

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Anggota)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
 NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Porgram Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Rostiati dan Ayahanda Bakhtiar tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag. dan Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc, M. Th. I. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua program studi Perbankan Syariah Bapak I Nyoman Budiono, M.M yang telah meluangkan waktu dalam mendidik selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan sarannya bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.
6. Para Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Bapak Wahidin Syanur, S.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan Penulis.
9. Pimpinan dan Pegawai/Staf Kantor Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Sahabat-sahabat yang telah mendukung dan berlaku baik kepada penulis.
11. Serta teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

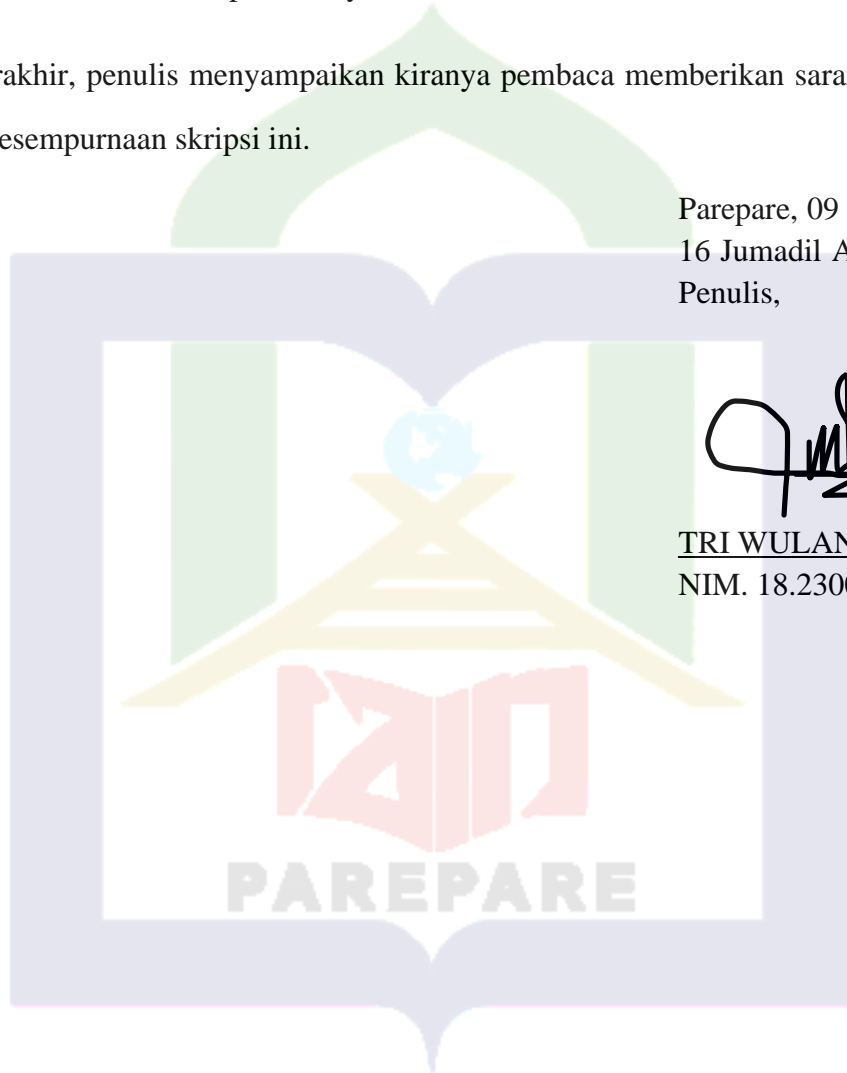
Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 09 Januari 2022  
16 Jumadil Akhir 1444 H  
Penulis,



TRI WULANDARI  
NIM. 18.2300.081



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Tri Wulandari  
Nim : 18.2300.081  
Tempat Tanggal/Lahir : Parepare, 30 April 2000  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Januari 2023

Penyusun,



TRI WULANDARI  
NIM 18.2300.081



## ABSTRAK

**Tri Wulandari**, *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Mukhtar Yunus).

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan masyarakat. Dinas Sosial Kota Parepare melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada perubahan RPJMD Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, kepala bidang rehabilitasi sosial, dan kepala bidang korban bencana. Data sekunder dari penelitian sebelumnya yaitu buku, skripsi, dan jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare termasuk efektif dalam menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, karena dalam melakukan penyaluran dana bantuan sosial dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, pemberian bantuan sosial yang diserahkan oleh pihak kantor kelurahan belum dilakukan secara efektif karena bantuan sosial yang diberikan tidak sepenuhnya diterima oleh penerima bantuan sosial. Maka pihak Dinas Sosial Kota Parepare selalu melakukan perbaikan setiap tahunnya.

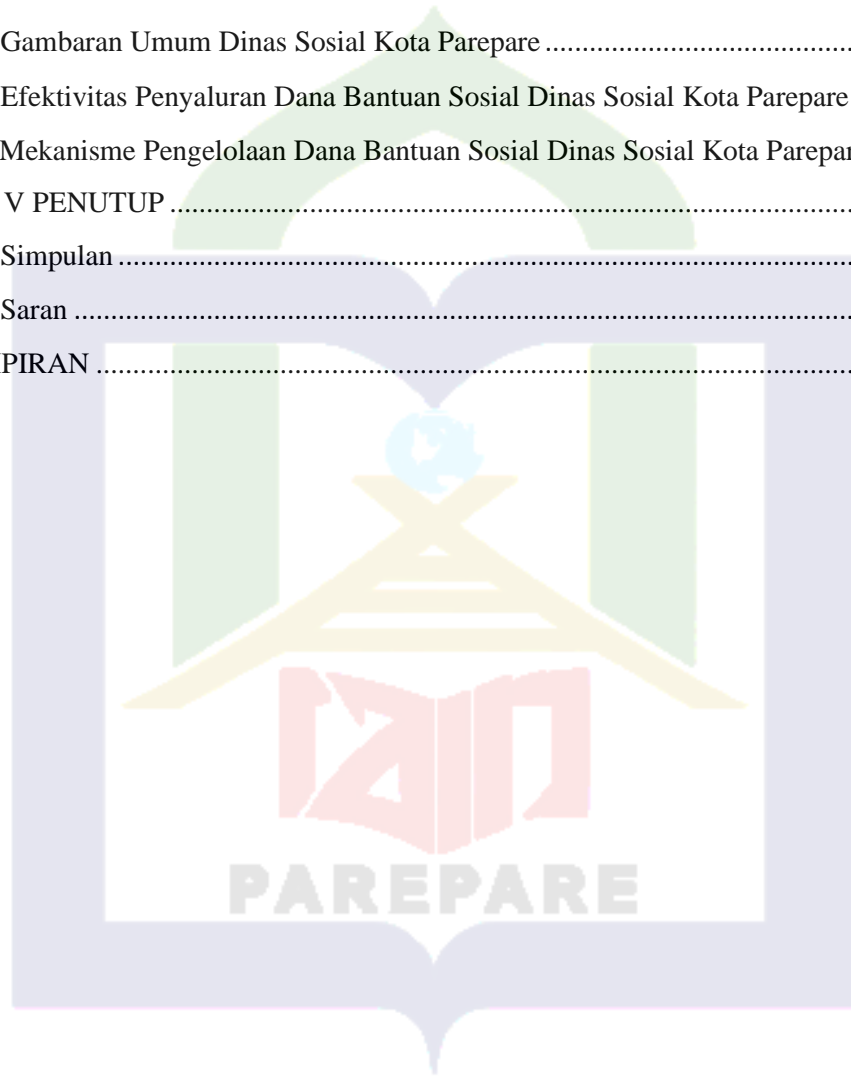
2) Mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial Dinas Sosial Kota Parepare yang dilaksanakan pada setiap Kelurahan dimulai dengan pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan kemudian dikoordinasikan kepada Kantor Kelurahan dan pimpinan di atasnya serta penyaluran bantuan dari Kelurahan melalui Kepala Lingkungan sampai kepada masyarakat yang sudah terdata sebelumnya.

Kata Kunci: Dinas Sosial Kota Parepare, Bantuan Sosial

## DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR GRAFIK .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori .....	9
C. Kerangka Konseptual .....	26
D. Kerangka Pikir .....	28
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber data .....	32

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	33
F. Uji Keabsahan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Parepare .....	37
2. Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Parepare .....	44
3. Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Parepare .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Simpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>



## DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Kota Parepare	48
4.2	Data Penerima Bantuan Sosial 2017-2021	57



## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30



## DAFTAR GRAFIK

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Realisasi Penerima Bantuan Sosial	56
4.2	Jumlah Penerima Bantuan Masyarakat Miskin	58
4.3	Jumlah Penerima Bantuan Disabilitas	59
4.4	Jumlah Penerima Bantuan Korban Bencana	61



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	66
2.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	68
4.	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	69
5.	Rekomendasi Penelitian	70
6.	Surat Selesai Meneliti di Dinas Sosial Kota Parepare	71
7.	Surat Keterangan Wawancara	72
8.	Foto Dokumentasi Wawancara	75
9.	Sosial Media Dinas Sosial Kota Parepare	76
10.	Biodata Penulis	77

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. TaMarbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

أَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

أَلْحَقُّ : *al-haqq*

أَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dandihadului oleh huruf kasrah (ـِ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, iatidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

### 10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعی	=	صلی الله علیه وسلم

ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bantuan sosial (Bansos) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan: “Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.<sup>2</sup>

Penyaluran bantuan sosial merupakan otoritas administratif masing-masing pemerintah daerah. Namun akibat dari ketidak seragaman pedoman yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial disetiap daerah yang tertuang dalam peraturan pemerintah daerah, diduga ini dipengaruhi oleh masing-masing pemerintah daerah. Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial, tetapi ada beberapa penelitian yang menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan penerapan kebijakan, kinerja ataupun tingkat pengungkapan secara umum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin* (Aceh: Unimal Press, 2019), Hal 1-2

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.

<sup>3</sup> Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin* (Aceh: Unimal Press, 2019). Hal 1-2

Pada masyarakat yang bersahaja, kemiskinan identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer. Walaupun begitu, pengertian kemiskinan akan berbeda dalam masyarakat kota, kemiskinan berarti harta benda yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar kehidupan kota sehingga kemiskinan menjadi masalah sosial.

Saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami krisis ekonomi, salah satunya yakni akibat dari kurangnya lowongan pekerjaan bagi masyarakat menengah kebawah. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menyebabkan penurunan ekonomi disuatu Negara, karena banyaknya pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan persoalan besar bagi Negara di dunia untuk terus meningkatkan pembangunannya agar tidak semakin menurun dalam perkembangan zaman yang selalu mengalami perubahan.

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi pusat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk. Kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat yang sangat perlu segera diatasi. Untuk mengatasi kemiskinan ini sangatlah penting dan harus mendapat perhatian lebih karena kemiskinan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, sehingga beban sosial ekonomi, rendahnya produktivitas sumberdaya manusia, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, dan merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah.<sup>4</sup>

Kemiskinan menyangkut pula dengan material, sosial, kultural, institusional, dan struktural. Menurut Piven dan Cloward, dan Swanson dalam Suharto:

“Bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Kekurangan materi, menggambarkan kelangkaan barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan

---

<sup>4</sup> Eva Auliya, Slamet Muchsin, dan Hayat, “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19”, Jurnal Respon Publik, 15.7 (2021). Hal 1

penghasilan dikaitkan dengan standar garis kemiskinan. Sedangkan kesulitan memenuhi kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat”.<sup>5</sup>

Pemerintah Kota Parepare telah menyelesaikan verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) bagi keluarga penerima manfaat, untuk bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk Bantuan Sosial bersumber dari APBN 2021, yaitu BPNT Tahun 2020 dan 2021 jumlah penerimanya sama yakni 6.425 KPM. Sedangkan, untuk PKH tahun 2020, total penerima yakni 3.218 KPM, sementara tahun 2021 total penerimanya yakni 3.159 KPM. Bersumber dari APBN, BPNT ini diperuntukkan kepada 6.425 KPM, PKH 3.259 KPM yang tahun lalu berjumlah 3.218. Namun ada pengurangan penerima, karena ekonomi masyarakat yang bersangkutan susah membaik, maka diminta keluar dari penerima manfaat. Untuk penerima bantuan sosial tunai (BST), juga masih sama dengan jumlah penerima tahun 2020, yakni 4.982 KPM. Bantuan tersebut merupakan bantuan pusat untuk Kota Parepare tahun 2021. Sementara APBD dalam bentuk program di Dinas Sosial, pagu wilayah sebesar Rp 4 milyar lebih. Dinas Sosial juga programkan bantuan biaya pemakaman bagi masyarakat kurang mampu yang jumlah penerimanya sekitar 93 orang.<sup>6</sup>

Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri atas 14 (empat belas) kriteria kemiskinan. Menurut Kemensos RI, 14 kriteria kemiskinan meliputi:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.

---

<sup>5</sup> Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin* (Aceh: Unimal Press, 2019), Hal 26-27

<sup>6</sup> Muh Arafah, “Data Penerima Bantuan Sosial Parepare Diperbaharui” (UPEKS.CO.ID, 6 Januari 2021).

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung seperti sungai atau air hujan.
6. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.<sup>7</sup>

Sebelum mendapatkan bantuan sosial masyarakat yang tergolong miskin yang sangat sulit untuk mengakses kesehatan dan pendidikan karena keterbatasan biaya. Tetapi masyarakat di Kota Parepare yang mendapat bantuan sosial tergolong orang yang mampu. Dan ada pula yang seharusnya pantas mendapatkan bantuan sosial tersebut justru tidak terdaftar. Tujuan bantuan sosial adalah untuk mensejahterakan

---

<sup>7</sup>Widjajanti Isdijoso, *et al.*, eds., *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*(Jakarta: The SMERU Research Institute, 2016) Hal 7

masyarakat yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari, akses kesehatan dan pendidikan lebih mudah.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka akan dibahas sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial di Kota Parepare?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial di Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran dana bantuan sosial pada Dinas Sosial di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial Pada Dinas Sosial di Kota Parepare.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk Peneliti

---

<sup>8</sup>Muh Arafah, "Data Penerima Bantuan Sosial Parepare Diperbaharui" (UPEKS.CO.ID, 6 Januari 2021).

- 1) Dengan penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat terkait efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial dinas sosial Pemerintah Kota Parepare.
  - 2) Bisa menjadikan landasan teori untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat sekitar khususnya Kota Parepare.
  - 3) Bisa menambah pengetahuan terkait memajukan daerah Kota Parepare melalui pengelolaan bantuan sosial dengan inovasi meningkatkan kebutuhan masyarakat
- b. Untuk Peneliti Berikutnya
- 1) Bisa dijadikan acuan teori penelitian selanjutnya terkait pengelolaan dana bantuan sosial pada dinas sosial
  - 2) Bisa memperkuat landasan teori tentang bantuan sosial dalam hal inovasi meningkatkan kebutuhan masyarakat
2. Kegunaan Praktis
- a. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare
- 1) Dengan penelitian ini diharapkan pihak fakultas ekonomi dan bisnis islam bisa meningkatkan pembelajaran terkait pengelolaan dana bantuan sosial.
  - 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa bisa memahami pentingnya pengelolaan dana bantuan sosial.
  - 3) Penelitian ini bisa dijadikan referensi yang relevan bagi mahasiswa IAIN Parepare utamanya fakultas ekonomi dan bisnis islam terkait pengelolaan dana bantuan sosial

- b. Untuk Umum ataupun Masyarakat Kota Parepare dan Sekitarnya
- 1) Dengan penelitian ini bisa memberikan motivasi terhadap Pemerintah Kota Parepare untuk lebih meningkatkan kebutuhan masyarakat.
  - 2) Dengan penelitian ini bisa menjadikan dasar bahwa Pemerintah Kota Parepare bisa meningkatkan kebutuhan masyarakat.
  - 3) Dengan adanya penelitian ini maka Pemerintah kota lainnya juga akan meningkatkan kebutuhan masyarakat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berkaitan dengan penelitian “Efektivitas Pengelolaan Dana Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)” ini belum pernah dilakukan oleh beberapa penelitian lain, tapi ada beberapa peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Avriyanti dengan judul “Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kegiatan pemberian bantuan sosial merupakan wujud dari kebijakan sosial, karena berupa pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.<sup>9</sup>
2. Nindya Cahya Rosadi dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-

---

<sup>9</sup> Avriyanti, “Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo” (*Skripsi Sarjana*: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar, 2015).



Tangerang”. Penelitian ini membahas efektivitas program bantuan sosial tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi covid-19. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat miskin di perumahan taman cikande. Penelitian ini jugamembahas mengenai peran pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.<sup>10</sup>

3. Agung Aldino Putra dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu (Studi tentang Kelompok Usaha Bersama)”. Tesis ini membahas mengenai efektivitas program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Tesis ini meneliti tentang bantuan sosial melalui kelompok usaha bersama yang mana programnya bernama bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) dengan meluncurkan bantuan kredit lunak.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang digunakan yang telah dibangun sebelumnya. Adapun teori yang digunakan adalah:

### 1. Teori Efektivitas

#### a. Defenisi Efektivitas

---

<sup>10</sup>Nindya cahya Rosadi, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang” (*Skripsi Sarjana* : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021)

<sup>11</sup> Agung Aldino Putra, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat di Kota Palu.” *Katalogis*, No.8 (8 Agustus 2018)

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Hal serupa juga dikemukakan oleh H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat S. yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas juga merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas saja, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi maupun sikap individu.<sup>12</sup> Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien yang ditinjau melalui sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan anggota, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai atau tingkat keberhasilan yang telah dicapai melalui suatu cara atau usaha yang sesuai dengan tujuan rencana tersebut. Selain itu efektivitas merujuk pada kaitan antara hasil yang telah dicapai, sudah sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.

#### b. Pendekatan Efektivitas

---

<sup>12</sup>Nindya Cahya Rosadi, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang” (*Skripsi Sarjana* : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021) Hal. 33-34

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kegiatan yang dilakukan sudah efektif. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas

1) Pendekatan Sumber

Pendekatan ini dilakukan untuk mengukur efektivitas dari sebuah input. Pendekatan ini juga mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik secara fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi.

2) Pendekatan Proses

Pendekatan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua rangkaian kegiatan baik itu proses internal ataupun mekanisme organisasinya.<sup>13</sup>

3) Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini dilakukan untuk melihat apakah output atau hasil dari program telah sesuai dengan rencana atau tidak.

c. Ukuran efektivitas

Tingkat efektivitas dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, artinya apabila hasil tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana awal maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu kegiatan tidak dapat dicapai sesuai rencana awal atau terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya maka kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Menurut Ducan yang dikutip Richard M. Steers

---

<sup>13</sup>Nindya cahya Rosadi, "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang" (*Skripsi Sarjana* : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021) Hal. 34-35

dalam buku “*Efektivitas Organisasi* “ mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Adalah seluruh upaya dari pencapaian tujuan harus dipandang sebagai sebuah proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yakni kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit dari sebuah program.

2) Integrasi

Integrasi dikaitkan dengan proses sosialisasi. Yang mana hal ini adalah sebuah pengukuran dari sebuah organisasi apakah sudah mampu mengadakan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan organisasi lainnya atau belum.

3) Adaptasi

Adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.<sup>14</sup>

Ukuran efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi criteria efektivitas, yakni sebagai berikut:

1) Ketepatan Waktu

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menenukan keberhasilan bahkan kegagalan dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi. Penggunaan waktu yang tepat sejatinya akan menciptakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>14</sup>Nindya cahya Rosadi, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang” (*Skripsi Sarjana* : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021) Hal. 35-36

2) Ketepatan Perhitungan Biaya

Hal berkaitan dengan tepat atau tidaknya pemanfaatan biaya. Artinya tidak mengalami kekurangan dan kelebihan dalam proses pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan selesai baik. Ketepatan dalam menetapkan biaya juga merupakan bagian dari pada efektivitas.

3) Ketepatan dalam Pengukuran

Hal ini digunakan untuk mengukur suatu kegiatan ataupun tugas yang telah menjadi tanggung jawab dalam suatu organisasi.

4) Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Hal ini berkaitan dengan tindakan seseorang untuk memilih kebutuhan dan keinginan yang mana hal ini bukanlah hal yang mudah.

5) Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir berkaitan dengan berbagai aspek, seperti kehidupan diri sendiri, orang lain dan alam semesta yang mana di dalam aspek tersebut mungkin memiliki pengaruh positif maupun negative.<sup>15</sup> Oleh karena itu dibutuhkan kejelasan agar memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai yang diharapkan.

6) Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran seorang pemimpin dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu organisasi. Dibutuhkan komunikasi yang baik dalam memberikan perintah dari seorang pemimpin kepada anggota sehingga perintah tersebut dapat dimengerti dengan baik.

---

<sup>15</sup>Nindya cahya Rosadi, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang” (*Skripsi Sarjana* : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021) Hal. 36-37

7) Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Suatu organisasi pasti memiliki tujuan, oleh karena itu organisasi akan berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai cara yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

8) Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran merupakan hal yang sangat penting dan menentukan efektivitas suatu organisasi. Jika tepat dalam menentukan sasaran, maka tujuan dari organisasi tersebut akan segera tercapai sesuai dengan rencana, begitu juga sebaliknya, jika sasaran tidak tepat maka dapat menghambat proses pencapaian.<sup>16</sup>

2. Teori Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam Bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrument, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.<sup>17</sup>

Menurut Ahmad Yani mekanisme adalah cara kerja suatu badan atau organisasi atau perkumpulan hal saling bekerja.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Nindya cahya Rosadi, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang” (*Skripsi Sarjana* : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021) Hal. 37

<sup>17</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), Hal 612-613

<sup>18</sup> Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) Hal. 275

Selanjutnya Moenir menjelaskan bahwa mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.<sup>19</sup>

Poerwadarmita mendefinisikan mekanisme adalah seluk beluk atau cara kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja.<sup>20</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan hasil yang maksimal sehingga dapat tercapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

### 3. Teori Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Menurut Ardiyos, dana dapat didefenisikan sebagai uang, surat berharga, serta harta lainnya yang sengaja disisihkan bagi suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kasmir mengemukakan bahwa:

- a. Dana dianggap sebagai kas
- b. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan
- c. Dana dianggap sebagai modal kerja
- d. Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan

<sup>19</sup> Moenir, H.A.S., *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) Hal. 53

<sup>20</sup> Poerwadarmita. W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) Hal. 757

- e. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan baik

Pengelolaan bantuan sosial didefinisikan sebagai upaya mengatur dari merencanakan sampai menyalurkan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.<sup>21</sup>

Dalam Dokumen Deskripsi dan Analisis APBD 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat atau organisasi profesi yang bertujuan untuk kepentingan umum.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian Negara/Lembaga mendefinisikan belanja bantuan sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang pengelolaan belanja bantuan sosial kementerian pertanian

---

<sup>21</sup>Indra Purwanto, "Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI NO. 20 Tahun 2019" (*Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah: Sumatera Utara, 2020) Hal. 19-21



tahun anggaran 2015, didefinisikan bahwa dana belanja bantuan sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami resiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada Lembaga permodalan secara mandiri.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian terkait dengan dana dan bantuan sosial yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh penjelasan bahwa pengelolaan dana bantuan dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dianggarkan didalam APBN/APBD oleh pemerintah pusat/daerah yang peruntukannya ialah sebagai bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Dalam rangka pengelolaan dana pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, sehingga diperlukan suatu kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial diatur di dalam peraturan Menteri dalam negeri yang telah mengalami beberapa kali perubahan.<sup>23</sup>

#### 4. Teori Manajemen Syariah

##### a. Pengertian Manajemen

---

<sup>22</sup>Indra Purwanto, “Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI NO. 20 Tahun 2019” (*Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah: Sumatera Utara, 2020) Hal. 19-21

<sup>23</sup> Indra Purwanto, “Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI NO. 20 Tahun 2019” (*Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah: Sumatera Utara, 2020) Hal. 19-21

Kata manajemen berasal dari bahasa lain yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut digabung menjadi kata-kata kerja *manager* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage* dengan kata benda *management*, *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>24</sup>

Dengan kata lain manajemen merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan dengan benar, baik, terencana dan terorganisir secara rapi agar dalam suatu usaha tersebut dapat dilakukan tanpa ada keragu-raguan dalam memutuskan atau dalam mengerjakan sesuatu. Karena dalam mengerjakan sesuatu dengan keragu-raguan akan menghasilkan hasil yang tidak optimal dan mungkin pada akhirnya tidak bermanfaat.

Manajemen menurut syariah memiliki pengertian yang cukup luas. Pengertian manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* adalah suatu aktifitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsure-unsur pokok dalam suatu proyek.

Menurut Taylor dalam buku Veithzal Rivai mengatakan manajemen diartikan sebagai *knowing exactly what you want to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way*, dari pengertian tersebut yang dimaksud Taylor mencakup tiga hal, yaitu adanya tujuan yang dicapai, adanya proses yang dapat menggegerkan dan mengerahkan manusia di

---

<sup>24</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014) Hal. 68

dalam organisasi pada suatu tujuan tertentu dan adanya upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisiensi.<sup>25</sup>

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.<sup>26</sup> Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur dengan menggunakan proses yang harus diikuti dengan baik dan tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Dikarenakan hal tersebut merupakan prinsip ajaran Islam.

Teori manajemen dalam Islam dengan teori lain memiliki karakteristik yang membedakan yaitu fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variable yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan luar organisasi dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh.<sup>27</sup> Manajemen syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.
- 2) Manajemen syariah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu.

---

<sup>25</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) Hal. 472

<sup>26</sup> Didin Hafidudin, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005) Hal. 3

<sup>27</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012) Hal. 253

- 3) Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan.

b. Dasar-dasar Manajemen Syariah

Islam mengajarkan segala sesuatu secara tepat, terarah, jelas dan tuntas. Hal ini merupakan prinsip utama dalam Islam. Manajemen menurut Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Beberapa prinsip manajemen Islam meliputi:

1) Keadilan

Kata kunci yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan konsep keadilan adalah *adl dan qist*. *Adl* mengandung pengertian *sawiyat* dan juga mengandung makna pemerataan dan kesamaan. Keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an juga bermakna menempatkan sesuatu pada porsinya.<sup>28</sup>

2) Amanah dan Pertanggung Jawaban

Al-Qur'an surat an-Nahl : 93

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَأَلْسُنُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya

<sup>28</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012) Hal. 253

dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.<sup>29</sup>

### 3) Komunikatif

Komunikatif menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan.

#### c. Prinsip-prinsip Manajemen Syariah

Manajemen erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, aplikasi manajemen harus diterapkan secara terencana untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist antara lain:<sup>30</sup>

##### 1) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang *ma'ruf* yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong menolong (*taawun*), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi dan lain-lain. Sedangkan perbuatan *munkar* (keji) seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus dijahui bahkan diberantas. Merayu pada kebajikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) adalah wajib.

<sup>29</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahnya* (Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013). Hal. 277

<sup>30</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisisa) Hal. 19

Al-Qur'an surah Al-Imran :104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>31</sup>

Untuk mencapai maksud tersebut perlu adanya golongan umat Islam yang bergerak pada bidang dakwah yang selalu member peringatan bilamana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Sehingga untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik dan bijak maupun secara ilmiah.<sup>32</sup>

## 2) Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.

## 3) Kewajiban Menegakkan Keadilan

<sup>31</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahnya* (Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013). Hal. 63

<sup>32</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) Hal 478

Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak dan adil dalam menghukum. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil terhadap orang lain.

4) Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian yang termasuk dalam kitab *al-Buyu'* (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan ummat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat.<sup>33</sup>

d. Fungsi Manajemen

Manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari:

1) Perencanaan (*Planning*)

---

<sup>33</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) Hal. 478

Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan dan memilih cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setiap organisasi tidak bisa lepas dari perencanaan. Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menentukan garis-garis besar untuk dapat memulai usaha. Kebijakan ditentukan, rencana kerja disusun baik mengenai saat bila maupun mengenai cara bagaimana usaha itu akan dikerjakan (*operation*). Fungsi ini dikehendaki dari manajer suatu pandangan ke depan dengan tujuan yang terang.<sup>34</sup>

Dalam konsep manajemen Islami perencanaan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini serta masa yang akan datang.<sup>35</sup> Oleh karena itu, untuk menentukan *planning* masa depan diperlukan kajian-kajian masa sekarang. Karena perencanaan merupakan bagian dari kesuksesan yang diraih.

## 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Ajaran Islam merupakan ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi rapi. Mengelompokkan dan menentukan berbagi kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Setelah ditetapkan rencana, maka kegiatan-kegiatan yang

<sup>34</sup> Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) Hal.

<sup>35</sup> Didin Fafiduddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005) Hal. 79



diperlukan untuk mencapai tujuan itu dibagi-bagi antara anggota manajemen dan bawahannya. Untuk itu pula diadakan penggolongan dengan tugas (*assignment*) sendiri-sendiri dan masing-masing mendapatkan kekuasaan yang telah ditentukan.

Proses pengorganisasian merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan tercapainya keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sangat erat kaitannya dengan perencanaan sebagai patokan pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian membutuhkan tingkat kerjasama yang tinggi mengingat hal tersebut merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak dalam organisasi.<sup>36</sup>

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Fungsi pelaksanaan dalam manajemen sebuah organisasi adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan untuk mencadikan perencanaan menjadi kenyataan.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab, penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang dipandang perlu. Manajer-manajer pada umumnya menganggap perlu untuk mengecek apa yang telah dilakukan guna dapat memastikan apakah pekerjaan orang-orangnya berjalan dengan memuaskan dan menuju kearah tujuan

---

<sup>36</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) Hal. 508

yang ditetapkan itu. Mungkin pula ada perbedaan-perbedaan “tunggakan” dalam pekerjaan, kesalah pahaman didalam melakukan tugas atau ada halangan yang tiba-tiba muncul.

### C. Kerangka Konseptual

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”. Untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka calon peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat pada judul tersebut.

1. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas juga merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas saja, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi maupun sikap individu. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan dari suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien yang ditinjau melalui sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output).<sup>37</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan anggota, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.<sup>38</sup>
2. Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

---

<sup>37</sup>Nindya cahya Rosadi, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang” (*Skripsi Sarjana* : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021) Hal. 33-34

<sup>38</sup>Nindya cahya Rosadi, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang” (*Skripsi Sarjana* : Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021) Hal. 33-34

pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>39</sup> Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan -penggunaan sumber daya organisasi yang telah ditentukan.<sup>40</sup>

3. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Menurut Ardiyos, dana dapat didefenisikan sebagai uang, surat berharga, serta harta lainnya yang sengaja disisihkan bagi suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.<sup>41</sup> Dana bantuan sosial adalah dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial. Bantuan yang diberikan dapat berupa barang maupun uang tunai.<sup>42</sup>
4. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>43</sup>
5. Manajemen merupakan seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.<sup>44</sup> Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk

---

<sup>39</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002) Hal. 695

<sup>40</sup> Handayaniingrat Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Cv Haji Masagung) Hal. 9

<sup>41</sup> Indra Purwanto, “Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI NO. 20 Tahun 2019” (*Skripsi Sarjana*: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah: Sumatera Utara, 2020) Hal. 19

<sup>42</sup> Donni Fernando Joshua Sirait, *Bantuan Sosial dalam Mensejahterakan Kebutuhan Masyarakat*

<sup>43</sup> Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 24 April 2022.

<sup>44</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 2

membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi kondisi sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.<sup>45</sup>

6. Syariah merupakan agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan.<sup>46</sup>

Maka dari pengertian tersebut, bahwa efektivitas penyaluran harus disesuaikan dengan adanya program dari bantuan sosial, sasaran yang diberikan bantuan, output dan input harus sesuai dan apakah tujuan tersebut tercapai. Mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial dimulai dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, melakukan pengawasan dalam melakukan penyaluran. Secara keseluruhan, pemberian bantuan sosial harus dilakukan dengan jujur atau tidak curang. Karena ada hak manusia yang harus disalurkan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat suatu skema atau bagan yang akan di jadikan sebagai kerangka pikir

---

<sup>45</sup> Winda Sari, "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan" *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*", Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, Hal. 41

<sup>46</sup> Sutomo Abu Nashr, *Antara Fiqih dan Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publisihing, 2018) Hal. 16

dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan bagannya yaitu untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare.





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi<sup>47</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari Kantor Dinas Sosial Kota Parepare.

Kemudian data dari hasil penelitian tersebut akan berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lokasi penelitian dan hasil datanya berupa teori.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kantor Dinas Sosial, Jl. Jenderal Sudirman No.12, Kelurahan Kampare Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan.

#### **C. Fokus Penelitian**

---

<sup>47</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) Hal. 26

Berdasarkan judul dan teori yang digunakan, maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dalam Analisis Manajemen Syariah di Dinas Sosial Kota Parepare.

#### **D. Jenis dan Sumber data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara.

##### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

###### **a. Data Primer**

Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, dokumentasi, dan gabungan dari keduanya.<sup>48</sup> Wawancara dilakukan kepada Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Parepare.

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung melalui media perantara. Dalam salah satu referensi menyebutkan bahwa sumber data sekunder adalah yang tidak bisa memberi informasi secara langsung pada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain,

---

<sup>48</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) Hal. 211



dan sebagainya.<sup>49</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur maupun pihak lain yang bersangkutan dengan objek yang diteliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian, yakni di daerah Kota Parepare. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian-kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>50</sup> Teknik observasi digunakan untuk mengetahui kondisi umum pada Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Parepare. Pemilihan teknik observasi dikarenakan peneliti ingin mendapatkan data/informasi yang akurat perihal objek kajian yang ingin diteliti secara langsung.

##### **2. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara juga dapat diartikan sebagai proses pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Parepare.

---

<sup>49</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) Hal. 211

<sup>50</sup> Sopiah Mamang Sanga Djieta, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010) Hal. 172-173

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, brosur, surat permohonan, laporan, dan foto.<sup>51</sup>

### F. Uji Keabsahan Data

Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu triangulasi dan *membercheck*.

#### 1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 2. Mengadakan *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh sumber data. Setelah *Membercheck* dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan *Membercheck*.

---

<sup>51</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Hal. 141

## G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>52</sup>

### 2. Penyajian Data

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018) Hal. 247

akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018) Hal. 247

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Parepare**

Dinas Sosial Kota Parepare merupakan sebuah Lembaga pemerintahan yang menanggulangi atau mengatasi permasalahan sosial terhadap masyarakat dalam rangka untuk mencapai sebuah kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare. Dinas sosial ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan peraturan Walikota Parepare Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kota Parepare menyelenggarakan fungsi:

##### **a. Tugas Pokok**

Merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana.

##### **b. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang sosial.

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Parepare sesuai tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang, merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penanggulangan masalah sosial dan penanggulangan bencana.
- b. Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretarian, sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang kepala sub bagian, yaitu:

- a) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- b) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial membawahi:
  - a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - b) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - c) Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang membawahi:
  - a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  - c) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, dan Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkoba)

- e. Bidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang Perberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulasi dan penataan lingkungan serta melakukan tugas kelembagaan, kepahlawanan dan restorasi sosial

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Sosial Kota Parepare dibantu oleh:

- a. Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan.

Sekretaris mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan asset serta evaluasi dan pelaporan.
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas.

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretarian, sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang kepala sub bagian, yaitu:

- a) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
  - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:
- 1) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam.
  - 2) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan perlindungan bencana sosial.
  - 3) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan jaminan kesejahteraan sosial keluarga.
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan rehabilitasi sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi, yaitu:
- 1) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pelayanan, pengasuhan, perlindungan dan pengangkatan anak.
  - 2) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan rehabilitasi disabilitas dan lanjut usia.
  - 3) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan tuna sosial, korban NAPZA dan HIV-Aids.
  - 4) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan tindak kekerasan dan pekerja migran (TKPM) dan,
  - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dibantu oleh 3 (Tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

- a) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia
  - b) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  - c) Kepala Seksi Tuna Sosial, korban perdagangan orang dan korban penyalahgunaan NAPZA
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulans dan penataan lingkungan serta melaksanakan tugas kelembagaan, keahlawanan dan restorasi sosial.

Kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan identifikasi dan penguatan kapasitas.
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulans dan penataan lingkungan.
- 3) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan kelembagaan, keahlawanan, dan restorasi sosial.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dibantu oleh 3 (Tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

- a) Kepala seksi identifikasian penguatan kapasitas
- b) Kepala seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulans dan penataan lingkungan

- c) Kepala seksi pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan dan restorasi social

**d. Rencana Strategis Dinas Sosial**

1) Visi

“TEWUJUDNYA KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA INDUSTRI TANPA CEROBONG ASAP YANG BERWAWASAN HAK DASAR DAN PELAYANAN DASAR MENUJU KOTA MAJU, MANDIRI DAN BERKARAKTER”

Intisari dari Visi ini, adalah pada lima sandaran pokok yang secara konseptual diarahkan pada aspek kesejahteraan masyarakat Kota Parepare, yaitu pada kata **“Industri Tanpa Cerobong Asap”, “Hak Dasar dan Pelayanan Dasar”, “Maju”, “Mandiri” dan “Berkarakter”**. Kelima kata ini merupakan kunci dalam menentukan arah pembangunan pemerintah dan masyarakat Kota Parepare, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- Industri Tanpa Cerobong Asap
- Hak Dasar dan Pelayanan Dasar
- Maju
- Mandiri
- Berkarakter

Mengaju kepada Visi dan Misi Walikota yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

2) Misi

Dari pengertian-pengertian pokok atas visi tersebut diatas, maka untuk mengimplementasikan apa yang tertuang dalam kelima substansi yang dijelaskan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a) Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan.

- b) Megoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan professional serta berkeadilan.
- c) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
- d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
- e) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
- f) Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

**e. Tujuan**

Mengacu kepada Visi dan Misi Walikota yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Tujuan adalah arah yang diinginkan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan. Tujuan ini akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka ikut merealisasikan visi dan misi yang diemban.

Berangkat dari harapan dan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Parepare Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah **“Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Penanganan Kesejahteraan Sosial”**.

Adapun sasaran adalah kondisi atau hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Oleh karena itu, dari tujuan diatas maka sasaran strategis dari Dinas Sosial Kota Parepare adalah “Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan rentan lainnya”.

Tujuan:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- 2) Meningkatkan pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial bagi PMKS
- 4) Meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

## **2. Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Parepare**

Kota Parepare adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare merupakan kota yang terkenal sebagai Kota kelahiran Presiden Republik Indonesia ketiga yaitu BJ. Habibie. Kota Parepare dalam menjalankan roda perekonomian tidak terlepas dari banyaknya usaha-usaha dan banyaknya tempat-tempat wisata. Kota Parepare merupakan salah satu kota yang dijadikan sebagai tempat wisatawan.

Dinas Sosial Kota Parepare merupakan sebuah Lembaga pemerintahan yang menanggulangi atau mengatasi permasalahan sosial terhadap masyarakat dalam rangka untuk mencapai sebuah kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare. Dinas sosial ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan peraturan Walikota Parepare Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, maka Dinas Sosial Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penyaluran dana bantuan merupakan penyaluran dana bantuan yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan berupa uang ataupun barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari adanya resiko sosial terhadap masyarakat.

Tingkat keefektivitasan sebuah program bantuan sosial dapat diukur menurut berbagai sudut pandang tergantung bagaimana cara menilai dan menginterpretasi. Mengukur keefektifitan sebuah program dibutuhkan sebuah indikator untuk mendapatkan seberapa efektif penerapan bantuan sosial tersebut diantaranya sosialisasi program, ketepatan sasaran, tujuan program, dan pemantauan program.

**a. Integrasi**

Integrasi berkaitan dengan proses sosialisasi. Yang mana hal ini adalah sebuah pengukuran dari sebuah organisasi apakah mampu mengadakan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan organisasi lainnya atau belum.

Sosialisasi program dimana Dinas Sosial Kota Parepare serta lingkungan masing-masing kelurahan. Sosialisasi program ialah titik untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Hal tersebut dicoba untuk memandang keahlian penyelenggara program bantuan sosial dalam melaksanakan sosialisasi tersebut, sehingga data program bantuan sosial bisa disampaikan kepada masyarakat penerima dana bantuan.

Sosialisasi program adalah keahlian Dinas Sosial Kota Parepare dalam melakukan sosialisasi program dorongan sosial, sehingga data program tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi program dinilai efektif dan efisien karena Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Kota Parepare tetap melakukan sosialisasi secara langsung karena pemerintah ingin masyarakatnya mendapatkan bantuan sosial agar hidup mereka tetap sejahtera.

Berdasarkan hasil temuan pada bab sebelumnya, proses sosialisasi mengenai program bantuan sosial ini telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Kelurahan. Dimana hasil wawancara menunjukkan bahwa, proses sosialisasi telah dilakukan dimana masyarakat telah diberikan informasi mengenai tujuan dari program bantuan sosial, sasaran program bantuan sosial, jumlah nominal yang akan didapatkan serta alur

pengambilan bantuan sosial. Proses sosialisasi dilakukan secara *door to door* dan melalui media *chat group*.

Dalam penyaluran dana bantuan sosial terlebih dahulu melakukan sosialisasi sehingga Bapak Wahidin Syanur, S.H. mengatakan bahwasanya:

“Pemberian dana bantuan sosial terlebih dahulu dilakukan adanya musyawarah yang dilakukan oleh pihak kelurahan, kemudian masyarakat dan pemerintah melaksanakan pertemuan, dan dari hasil pertemuan atau rapat yang telah dilakukan selanjutnya dilakukan pengusulan nama-nama warga setempat direkomendasikan oleh pihak kelurahan untuk diberikan bantuan sosial dengan syarat harus mempunyai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dari hasil musyawarah juga dilakukan pengelompokan jenis-jenis bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mempunyai dasar usaha seperti tukang batu, tukang las, penjual campuran dan usaha lainnya.”<sup>54</sup>

Selain itu berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa, dana bantuan yang ada pun tidak pernah dipotong nominalnya, karena memang masyarakat mengambil dana bantuan tersebut secara mandiri dilokasi pengambilan yang telah ditentukan. Sikap jujur dalam memberikan bantuan juga tertera dalam firman Allah swt sebagai berikut:

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah :188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Wahidin Syanur, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Wawancara Penelitian di Dinas Sosial Kota Parepare pada 09 Januari 2023

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Krim dan Terjemahnya* (Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013). Hal. 29

Ayat diatas menjelaskan larangan untuk mengambil hak orang lain. Kita ketahui bersama, bahwa banyak sekali fenomena dimana uang bantuan sosial yang tidak diberikan sesuai dengan jumlahnya. Namun, untuk setiap kelurahan, jumlah uang bantuan selalu sesuai dengan jumlah yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial.

#### **b. Adaptasi**

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu, digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan hasil temuan pada bab sebelumnya, adanya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial harus dilakukan dengan sangat efektif, karena manakalanya masyarakat yang patut diberikan bantuan malah dimanipulasi oleh oknum setempat.

Pelaksanaan yang efektif dan efisien dimana sasaran dari pemerintah yang hendak dijadikan partisipan program bantuan sosial disetiap kelurahan Kota Parepare dengan niat membantu masyarakat miskin.

Dalam penyaluran dana bantuan sosial dapat dikatakan efektif dan efisien apabila dilakukan dengan tepat dimana Bapak Wahidin Syanur, S.H. mengatakan bahwasanya:

“Dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan tentu harus dilakukan dengan secara efektif dan efisien, apabila pemberian dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mampu maka hal tersebut tidak efektif dan tidak efisien. Dan apabila ada masyarakat yang mampu, kemudian ketahuan oleh pihak Dinas Sosial Kota Parepare maka dilakukan penarikan dana bantuan tersebut. Biasanya hal itu terjadi dilakukan oleh oknum atau pihak setempat”.<sup>56</sup>

No.	Indikator	efektivitas
1	Integrasi	Proses sosialisasi dilakaun secara rapat yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kelurahan, kemudian diberitahukan kepada masyarakat.

<sup>56</sup> Wahidin Syanur, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Wawancara Penelitian di Dinas Sosial Kota Parepare pada 09 Januari 2023



2	Adaptasi	Masyarakat harus menyisihkan waktunya untuk mengambil bantuan.
3	Pencapaian Tujuan	
	Kurun Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah membantu masyarakat walau tidak dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh.</li> <li>2. Bagi masyarakat yang berwirausaha, dapat dijadikan penambahan modal.</li> </ol>
	Sasaran	Belum tepat sasaran, dimana penerima bantuan sosial masih ada yang tidak menerima bantuan dan pemberian bantuan belum sepenuhnya diberikan kepada masyarakat.

Tabel 4.1 (Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Kota Parepare)

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat di Kota Parepare ada beberapa program bantuan diantaranya yaitu:

- Program Jaminan Kesehatan, pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu sebesar Rp 2 Juta Per Kepala Keluarga.
- Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya. Penerima PKH di berikan kepada 4 kecamatan di Kota Parepare menerima bantuan sosial. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI kepada Kota Parepare bantuan PKH diberikan sebesar Rp 200 Ribu per bulan untuk tiap KPM. Sementara untuk PKH yang memiliki kriteria tertentu yaitu, keluarga yang memiliki ibu hamil/balita akan menerima bantuan sebesar Rp 3 Juta per tahun. Untuk keluarga yang memiliki anak



SD menerima Rp 900 Ribu per tahun, anak SMP Rp 1,5 Juta dan anak SMA Rp 2 Juta per bulan tetapi khusus siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

- Program Bantuan Pangan Non-Tunai/ Bantuan Rastra, pemerintah memberikan masyarakat penerima manfaat dalam bentuk beras kualitas medium sebanyak 5kg/KPM setiap bulannya. Penerima PKH di berikan kepada 4 kecamatan di Kota Parepare menerima bantuan sosial. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI kepada Kota Parepare.
- Bantuan Sosial Rumah Sejahtera Terpadu (RST) adalah rumah yang telah mendapat bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas sehingga memenuhi syarat rumah layak huni sebagai tempat tinggal dan atau tempat usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima program yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tempat tinggal dengan memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas penerima bantuan. Kelompok calon penerima bantuan sosial rehabilitasi RLH beranggotakan paling sedikit 3 kepala keluarga dan paling banyak 15 kepala keluarga. Bantuan disalurkan kepada kelompok atau perseorangan sebesar Rp. 20 Juta per rumah dan dilaksanakan secara bergotong-royong serta tidak bisa dipihak ketigakan dan atau digunakan untuk membayar jasa atau upah.

**c. Pencapaian Tujuan (Waktu dan Sasaran)**

Pencapaian tujuan adalah seluruh upaya dari pencapaian tujuan harus dipandang sebagai sebuah proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yakni kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit dari sebuah program bantuan sosial.

**1) Kurun Waktu**

Kurun waktu yang dimaksud adalah pelaksanaan program bantuan sosial yang dilakukan setiap tanggal 10 Januari setiap tahunnya. Bantuan sosial ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, uang ini digunakan oleh mereka seperti untuk penambah modal dan yang utama adalah untuk membeli kebutuhan pokok. Namun memang, uang bantuan yang diberikan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka selama sebulan penuh.

## 2) Sasaran

Sasaran adalah sejauh mana program bantuan sosial ini diberikan kepada mereka yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima bantuan sosial adalah masyarakat fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, korban bencana, Wanita rawan sosial (janda), orang terlantar, korban narkoba, tuna susila, anak nakal, dan penyakit kronis.

Pencapaian tujuan dimana dengan adanya waktu pelaksanaan yang waktu dan tepat pada target yang membutuhkan, dimana Bapak Wahidin Syanur, S.H. mengatakan bahwasanya:

“Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang sudah terdata maka harus dilakukan dengan tepat waktu dan tepat sasaran atau sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Penyaluran dana bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang tergolong miskin, tergolong lanjut usia, dan tergolong Wanita rawan sosial (janda) yang tidak mempunyai penghasilan. Maupun masyarakat yang terdampak musibah”.<sup>57</sup>

Sasaran penerima dana bantuan sosial yang telah didata dari setiap kelurahan sudah dilakukan dengan ketepatan sasaran, karena masyarakat tersebut sudah tercatat di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai keluarga penerima bantuan sosial. Tetapi, pemberian bantuan sosial dari pemerintah Kota Parepare tidak sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Dari hasil wawancara salah satu penerima bantuan sosial Ibu Rostiati menyatakan bahwasanya:

“ Bantuan yang diberikan pemerintah tidak diberikan sepenuhnya kepada penerima, seperti contohnya pemberian 5 kg beras, 1 dos indomie, telur 5 rak, susu kental manis 10 kaleng. Tetapi ternyata yang sampai kepada penerima bantuan tidak sesuai dengan pemberian dari pemerintah Kota Parepare.”

Tujuan program dari Dinas Sosial Kota Parepare, ialah untuk menolong perekonomian masyarakat miskin ataupun terdampak musibah. Meskipun masih ada masyarakat yang masih tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun

---

<sup>57</sup> Wahidin Syanur, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Wawancara Penelitian di Dinas Sosial Kota Parepare pada 09 Januari 2023

sebaliknya, dimana ada masyarakat yang tidak pantas mendapatkan bantuan tetapi tercatat di DTKS.

Anggaran penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Parepare bagi masyarakat:

1. Penyandang Cacat dan Lansia

Penerima bantuan sosial bagi penyandang cacat dan lansia diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 2,4 Juta.

2. Korban Bencana

Penerima bantuan korban bencana diantaranya yaitu, korban kebakaran dengan jumlah sebesar Rp 5 Juta Per KK, korban tanah longsor diberikan dengan jumlah sebesar Rp. 1.480.000 Per KK.

3. Keluarga Fakir Miskin

Penerima bantuan sosial bagi keluarga fakir miskin diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 1,5 Juta per bulan.

4. Wanita Rawan Sosial

Pemerintah Kota Parepare memberikan bantuan kepada Wanita rawan sosial (janda) berupa barang-barang yang dapat mereka jual atau tambahan barang jualan. Wanita rawan sosial juga diberikan dalam bentuk sembako berupa beras 10kg, gula pasir 10kg, mie instan 2 dos, susu kaleng 5 dos, dan minyak goreng 4 liter.

5. Orang Terlantar

Pemerintah Kota Parepare memberikan bantuan kepada anak terlantar berupa Kartu Indonesia Pintar sebagai jaminan untuk pendidikan, Kartu Indonesia Sehat sebagai jaminan untuk kesehatan serta bantuan tunai dan non tunai berupa sembako.

Kemudian indikator keempat, yaitu pemantauan program bantuan sosial yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Parepare. Pemantauan atau pengawasan yang dilaksanakan pada program bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Parepare, dicoba selaku wujud atensi kepada masyarakat Kota Parepare. Pemantauan dilakukan agar dapat diidentifikasi sejauh mana penerapannya. Kegiatan pemantauan adalah aktivitas yang dilaksanakan setelah melakukan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Dinas Sosial Kota Parepare akan melakukan penyempurnaan dalam kekurangan-kekurangan yang terjadi maka pihak Dinas Sosial Kota Parepare akan melakukan perbaikan ditahun berikutnya, contohnya seperti kekurangan waktu dalam melakukan verifikasi dan validasi maka ditahun berikutnya akan dilakukan dengan tepat waktu. Setiap saat dan setiap waktu pihak Dinas Sosial akan tetap melakukan evaluasi baik dalam teknisnya, mutu dalam pelayanan, kuantitas, dan kualitas.

Jadi, dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, dari segi efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial dari pihak dinas sosial telah dikatakan efektif karena sudah melakukan sesuai dengan prosedur dari Kementerian Sosial. Tetapi dari hasil penelitian lapangan dinyatakan tidak efektif karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak disampaikan dengan sepenuhnya oleh pihak kelurahan. Maka dari hasil penelitian ini efektivitas penyaluran dana bantuan sosial dinyatakan belum efektif dalam penyaluran bantuan sosial.

### **3. Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Parepare**

#### **3.1 Peraturan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial**

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial menggunakan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Bab IV No.1 Tahun 2019 tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial yaitu:

- a. Pasal 21:
  - 1) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang dari pemneri bantuan sosial dilakukan melalui bank penyalur ke rekening penerima bantuan sosial.
  - 2) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:
    - a) Proses registrasi dan atau pembukaan rekening;
    - b) Pelaksanaa n edukasi dan sosialisasi;
    - c) Proses penyaluran; dan

- d) Penarikan uang dan atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial.
- 3) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada penerima bantuan sosial, tidak dikenakan biaya oleh bank penyalur.
- 4) Mekanisme secara khusus penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 22:

- 1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai surat keputusan yang ditetapkan, disertai dengan berita acara serah terima bantuan sosial

Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial menggunakan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Bab V No.1 Tahun 2019 tentang rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial yaitu:

- a. Pasal 23: Bantuan sosial yang penyalurannya melalui bank penyalur ke rekening penerima bantuan sosial harus dilakukan rekonsiliasi.
- b. Pasal 24:
  - 1) Jenis rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari:
    - a) Rekonsiliasi eksternal; dan
    - b) Rekonsiliasi internal.
  - 2) Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a) Tingkat pusat; dan
    - b) Tingkat wilayah/daerah.

- 3) Rekonsiliasi eksternal tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan bank penyalur bantuan sosial.
- 4) Rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh cabang bank penyalur dengan dinas sosial setempat.
- 5) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan dinas sosial daerah provinsi atau dinas sosial daerah kabupate/kota.
- 6) Mekanisme rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 25:

- 1) Rekonsiliasi penyaluran dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap tahapan penyaluran.
- 2) Rekonsiliasi penyaluran tahap akhir dan rekonsiliasi tahunan pada akhir tahun dilaksanakan paling lambat tanggal 10 januari setiap tahunnya.
- 3) Rekonsiliasi penyaluran setiap tahap paling sedikit memuat informasi:
  - a) Anggaran bantuan sosial setiap tahap penyaluran;
  - b) Realisasi bantuan sosial yang disalurkan setiap tahap penyaluran;
  - c) Sisa dana bantuan sosial yang tidak tersalur;
  - d) Dana yang disetorkan ke kas negara;
  - e) Dana retur yang belum dan atau disalurkan;
  - f) Dana sisa bantuan sosial yang belum dan atau tersalur tahun sebelumnya;

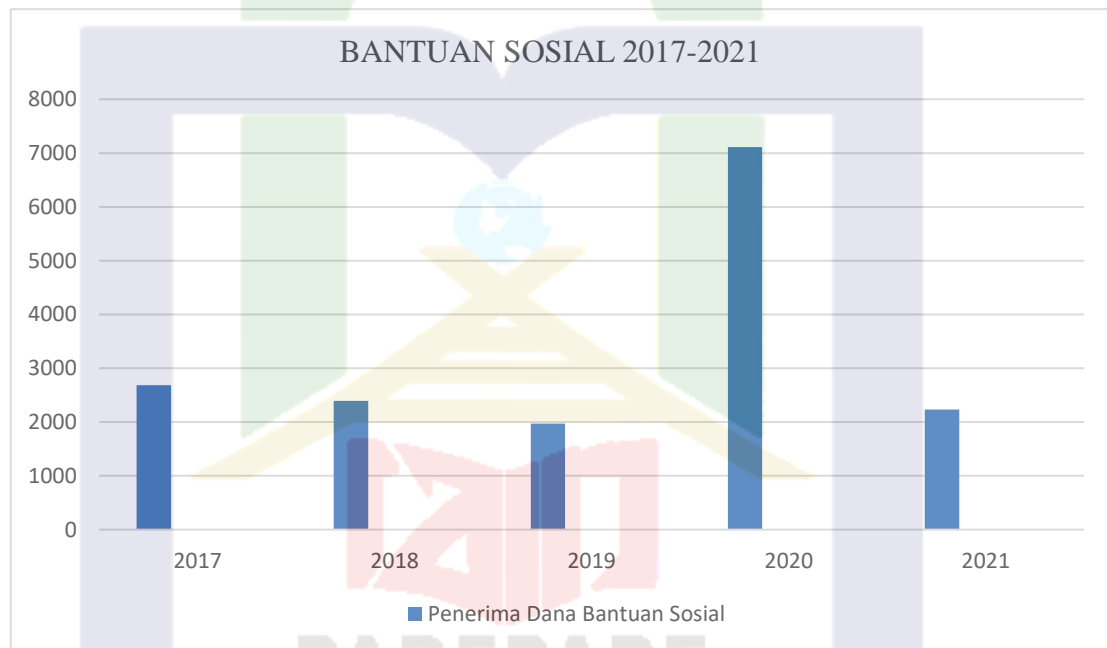
- g) Dana bantuan sosial yang akan disetor ke kas negara; dan
  - h) Dana bantuan sosial yang akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.
- 4) Rekonsiliasi tahunan paling sedikit memuat informasi:
- a) Anggaran bantuan sosial setiap tahap penyaluran;
  - b) Realisasi bantuan sosial yang disalurkan setiap tahap penyaluran;
  - c) Sisa dana bantuan sosial yang tidak tersalur;
  - d) Dana yang disetorkan ke kas negara;
  - e) Dana retur yang belum dan atau disalurkan;
  - f) Dana sisa bantuan sosial yang belum dan atau tersalur tahun sebelumnya;
  - g) Dana bantuan sosial yang akan disetor ke kas negara; dan
  - h) Dana bantuan sosial yang akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.
- a. Pasal 26:
- 1) Rekonsiliasi internal dilaksanakan menggunakan sumber data yang berupa:
    - a) Berita acara serah terima barang dari kantor pusat Kementerian Sosial ke gudang provinsi/wilayah;
    - b) Berita acara serah terima bantuan sosial dalam bentuk barang dari gudang provinsi/wilayah ke masyarakat; dan
    - c) Hasil *opname* fisik terhadap persediaan yang berasal dari bantuan sosial dalam bentuk barang yang dilaksanakan setiap bulan dan ditandatangani oleh penanggung jawab barang.
  - 2) Sumber data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan rekonsiliasi antara aplikasi persediaan tingkat provinsi/wilayah dengan kantor pusat Kementerian Sosial yang memuat informasi terkait:

- a) Jumlah bantuan sosial yang telah disalurkan; dan
- b) Jumlah barang bantuan sosial yang masih tersisa diseluruh gudang provinsi/wilayah.

### 3.2 Mekanisme Pengelolaan Penyaluran Bantuan Sosial

Realisasi program bantuan sosial di Kota Parepare dalam kurun waktu tahun 2017-2021 (Gambar2) digunakan untuk membiayai program bantuan sosial guna mengupayakan pengurangan dari kebutuhan masyarakat miskin di Kota Parepare.

#### REALISASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KOTA PAREPARE



Grafik 4.1 (Realisasi Penerima Bantuan Sosial)

NO	PENERIMA BANTUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyandang Cacat	210	218	120	1.181	500
2	Lanjut Usia (Lansia)	473	398	267	270	218
3	Korban Bencana	52	326	256	4.380	483
4	Keluarga Fakir Miskin	1.893	1.358	1.296	1.218	964



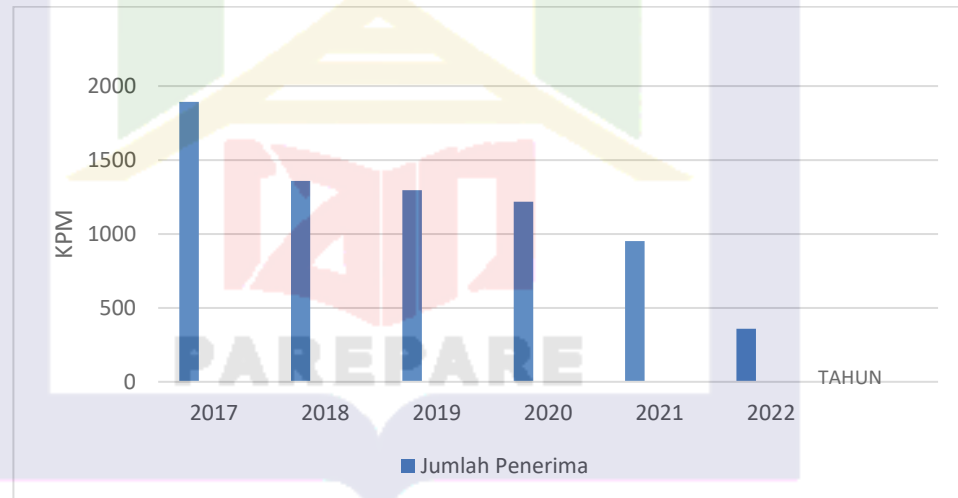
5	Wanita Rawan Sosial	25	35	22	0	30
6	Orang Terlantar	9	39	9	61	37
<b>JUMLAH</b>		<b>2.667</b>	<b>2.374</b>	<b>1.970</b>	<b>7.110</b>	<b>2.232</b>

Tabel 4.2 (Data Penerima Bantuan Sosial 2017-2021)

**a. Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin Pagu Wilayah Kota Parepare**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Parepare pada Tanggal 25 Januari 2023 mengenai penerimaan dana bantuan sosial pada tahun 2017-2022. Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Masyarakat Fakir Miskin Bapak Wahidin Syanur, S.H. mengatakan bahwa:

“Pada Tahun 2017 penerima bantuan bagi masyarakat miskin sebanyak 1.893 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Pada Tahun 2018 penerima bantuan sebanyak 1.358 KPM, Pada Tahun 2019 penerima bantuan sebanyak 1.296 KPM, Pada Tahun 2020 penerima bantuan sebanyak 1.218 KPM, Pada Tahun 2021 penerima bantuan sebanyak 952 KPM, dan Pada Tahun 2022 penerima bantuan sebanyak 358 KPM”.<sup>58</sup>



Grafik 4.2 (Jumlah Penerima Bantuan Masyarakat Miskin)

**b. Bantuan Sosial bagi Penderita Disabilitas Pagu Wilayah Kota Parepare**

<sup>58</sup> Wahidin Syanur, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Wawancara Penelitian di Dinas Sosial Kota Parepare pada 09 Januari 2023

Penyediaan dana terhadap penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas adalah sangat penting. Kepentingan tersebut mencakup mengenai alasan-alasan sehingga perlu penyediaan dana bagi penyandang disabilitas dan penentuan macam kebutuhan yang perlu penyediaan dana.

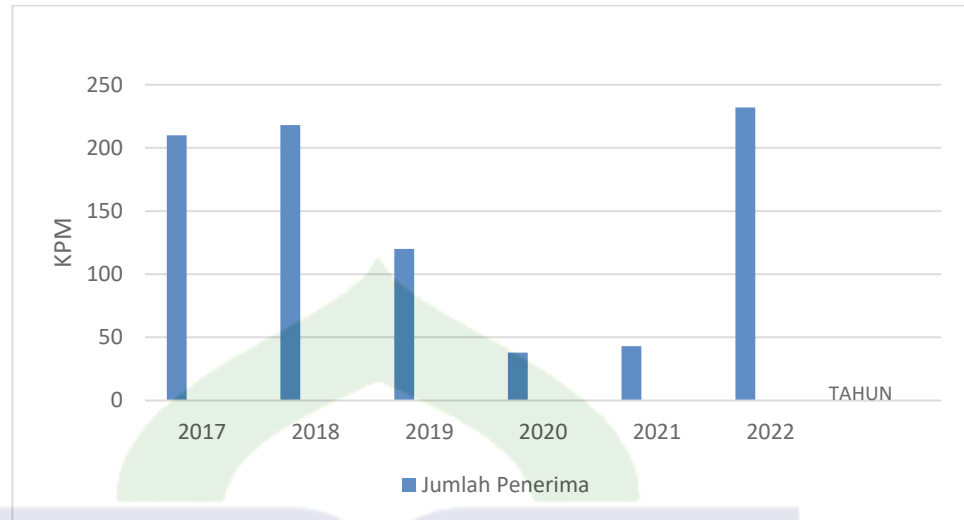
Strategi penganggaran terhadap penyandang disabilitas tergantung kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan penyandang disabilitas, dalam konteks pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka urusan tersebut termasuk urusan yang didesentralisasikan ke daerah. Untuk itu daerah dapat menyediakan dari PAD yang berasal dari pajak hiburan dengan pola *earmarking*. Apabila hal tersebut belum mencukupi mengingat potensi pajak daerah yang tidak ada atau tidak memadai, maka untuk pendanaan penyandang disabilitas dapat disediakan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan lain yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Parepare pada Tanggal 27 Januari 2023 mengenai penerima bantuan sosial bagi masyarakat penderita disabilitas pada tahun 2020-2022. Selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Ibu Hj. Heriyati, S.E. mengatakan bahwa:

“Pada Tahun 2017 penerima bantuan bagi masyarakat miskin sebanyak 210 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Pada Tahun 2018 penerima bantuan sebanyak 218 KPM, Pada Tahun 2019 penerima bantuan sebanyak 120 KPM, Pada Tahun 2020 penerima bantuan sebanyak 38 KPM, Pada Tahun 2021 penerima bantuan sebanyak 43 KPM, dan Pada Tahun 2022 penerima bantuan sebanyak 232 KPM”.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Heriyati, Kabid Rehabilitasi Sosial, Wawancara Penelitian di Dinas Sosial Kota Parepare pada 09 Januari 2023



Grafik 4.3 (Jumlah Penerima Bantuan Disabilitas)

Kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dapat terwujud melalui beberapa program peningkatan fungsi sosial penyandang disabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pembentukan MOST-UNISCO merupakan komite ilmu pengetahuan nasional intergovernmental yang berada dibawah koordinasi BRIN.

Program ini merupakan wujud upaya pemerintah agar penyandang disabilitas mendapatkan rasa percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri. Harapannya, fungsi sosial mereka akan sama seperti layaknya individu yang bukan disabilitas.

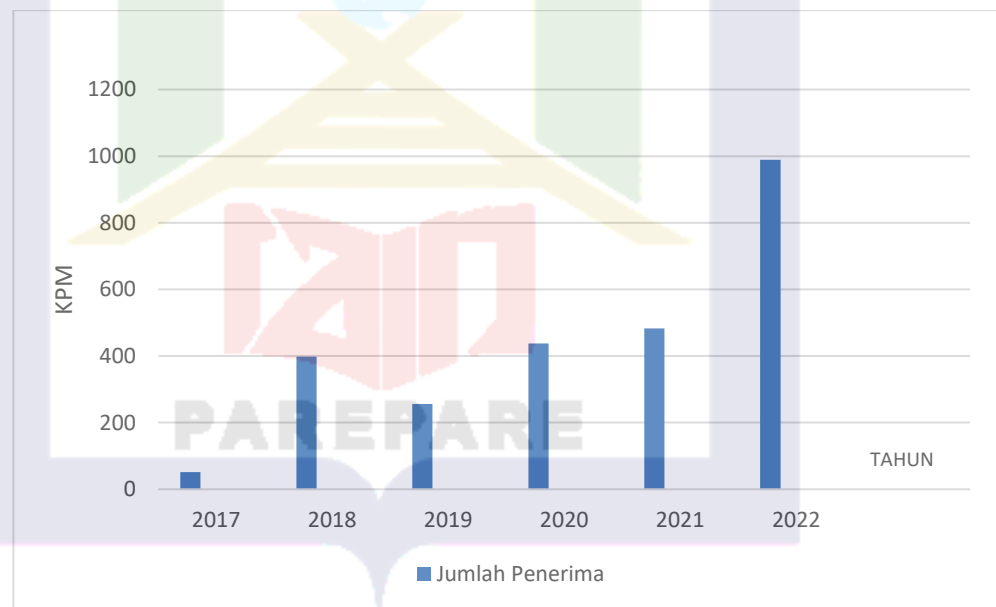
**c. Bantuan Sosial bagi Masyarakat Berdampak Musibah/Bencana Pagu Wilayah Kota Parepare**

Pengelolaan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini yang kegiatan penanggulangan bencana lebih banyak dilakukan sebagai tanggapan setelah terjadinya bencana, bukan antisipasi pencegahan bencana. Selain masih minim, kegiatan antisipasi pencegahan bencana juga dilakukan tidak secara terpadu lintas departemen, tetapi lebih cenderung menjadi proyek sektoral

yang terpisah-pisah. Tanpa langkah-langkah antisipatif yang terpadu, bencana alam yang dapat dicegah dan bencana karena kelalaian manusia akan lebih sering terjadi. Kerugian material yang lebih besar dan korban jiwa masih berpotensi terus bertambah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Parepare pada Tanggal 27 Januari 2023 mengenai penerima bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena bencana atau musibah pada Tahun 2020-2022. Selaku Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Bapak Burhanuddin, S.E. mengatakan bahwa:

“Pada Tahun 2017 penerima bantuan bagi masyarakat miskin sebanyak 52 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Pada Tahun 2018 penerima bantuan sebanyak 398 KPM, Pada Tahun 2019 penerima bantuan sebanyak 256 KPM, Pada Tahun 2020 penerima bantuan sebanyak 438 KPM, Pada Tahun 2021 penerima bantuan sebanyak 483 KPM, dan Pada Tahun 2022 penerima bantuan sebanyak 989 KPM”.<sup>60</sup>



Grafik 4.4 (Jumlah Penerima Bantuan Korban Bencana)

<sup>60</sup> Burhanuddin, Kabid Bencana, Wawancara Penelitian di Dinas Sosial Kota Parepare pada 09 Januari 2023

Langkah antisipatif yang masih lemah diperburuk dengan kelemahan dalam pengelolaan bantuan bencana, yang kadang terkait dengan landasan hukum. Beberapa kelemahan dan kendala yang terjadi dilapangan selama ini adalah:

- 1) Penyaluran bantuan kemanusiaan yang terkumpul dari masyarakat tidak ada kontrol. Tidak ada laporan kepada masyarakat atas penggunaan dana oleh masyarakat sipil yang menghimpun dana masyarakat. Hal ini dapat berakibat *overlapping* dan inefisiensi penanggulangan bencana.
- 2) Tidak ada wewenang dan koordinasi terpusat sehingga penerimaan dan penyaluran bantuan bencana tersebut.
- 3) Dana bagi korban bencana dan kegiatan operasional petugas di tempat kejadian juga sering terhambat. Dana bencana Pemerintah sering kali tidak bisa cepat dicairkan. Alasannya, menunggu mekanisme pencairan dana.
- 4) Terkait dengan koordinasi antara pihak saat terjadi bencana alam. Tidak adanya badan tertinggi yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana membuat niat baik membantu korban bencana alam tidak berjalan baik.

PAREPARE

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terkait efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial dinas sosial Pemerintah Kota Parepare, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dinas Sosial Kota Parepare termasuk efektif dalam menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, karena dalam melakukan penyaluran dana bantuan sosial dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, pemberian bantuan sosial yang diserahkan oleh pihak kantor kelurahan belum dilakukan secara efektif karena bantuan sosial yang diberikan tidak sepenuhnya diterima oleh penerima bantuan sosial. Maka pihak Dinas Sosial Kota Parepare selalu melakukan perbaikan setiap tahunnya.
2. Mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial yang dilaksanakan di Kelurahan dimulai dengan pendataan penerima bantuan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan kemudian dikoordinasikan kepada Kantor Kelurahan dan pimpinan di atasnya serta penyaluran bantuan dari Kelurahan melalui Kepala Lingkungan sampai kepada masyarakat yang sudah terdata sebelumnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan dan kenyataan yang telah didapatkan oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan dengan “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare” maka saran yang peneliti berikan yaitu:

1. Kepada Dinas Sosial Kota Parepare, mengingat agar pentingnya melakukan pengawasan yang lebih ketat dan melakukan pengevaluasian dalam kegiatan penyaluran dana bantuan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

*Al-Qur'an dan Al-Karim*

Amru Alba dan Rudi Kurniawan. 2019. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. Aceh: Unimal Press.

Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*. Jakarta: Modern English Press.

Siswanto. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Hafidudin, Didin. 2005. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani

Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2012. *Manajemen Syariah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Nashr, Sutomo Abu. 2018. *Antara Fiqih dan Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publisihing.

Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ahmad Yani. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lorens Bagus. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.

Poerwadarmita. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Moenir. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Djietta, Mamang Sanga Sopiah. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Cv Haji Masagung

### **SKRIPSI:**

- Ambar, Pertiwi Dwi. 2020. “*Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Studi Di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu*”. Sumatera Utara: Program Studi Hukum Tata Negara: Medan.
- Purwanto, Indra. 2020. “*Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI NO. 20 Tahun 2019*”. Sarjana Skripsi: Program Studi Akuntansi: Medan.
- Rosadi, Nindya Cahya. 2021. “*Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang*”. Skripsi Sarjana: Program Studi Kesejahteraan Sosial: Jakarta.
- Avriliyanti. 2015. “*Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial(Bansos) Terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Paduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*”. Skripsi Sarjana: Program Studi Ilmu Administrasi Negara: Makassar.

### **JURNAL:**

- Isdijoso, Widjajanti, *et al.*, eds. 2016. *Penetapan Kriteria dan Variable Pendapatan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Eva Auliya, Slamet Muchsin, dan Hayat. 2021 “*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19*.” *Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.12*



- Zuraidah dan Sari Fatmawati. 2015. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Bantuan Dana Bagi Kesejahteraan Penyandang Cacat." *Jurnal Hukum Islam, Vol XV No.1*
- Sari, Winda. 2021. "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan." *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan, Vol I No. 1*
- Putra, Agung Aldino. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama)," *Katalogis, No 8 8 Agustus.*

**INTERNET:**

- Fernando, Donni Joshua Sirait. 2022. *Bantuan Sosial dalam Mensejahterakan Kebutuhan Masyarakat*. Tersedia: <https://getakan.desa.id/artikel/2022/8/8/bantuan-sosial-dalam-mensejahterakan-kebutuhan-masyarakat#:~:text=Jaminan%20Sosial%2C%20yaitu%20penerima%20bantuan%20terjamin%20dalam%20mendapatkan,tidak%20dapat%20memenuhi%20kebutuhan%20yang%20layak%20bagi%20kemanusiaan.>
- Aris, Kurniawan. 2022. *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*. Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



NAMA : TRI WULANDARI  
 NIM : 18.2300.081  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH  
 JUDUL : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA  
 BANTUAN SOSIAL DINAS SOSIAL  
 PEMERINTAH KOTA PAREPARE (ANALISIS  
 MANAJEMEN SYARIAH)

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan yang diajukan untuk pihak Dinas Sosial Kota Parepare :

- A. Eektivitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial
1. Bagaimana perencanaan dalam melakukan penyaluran dana bantuan sosial?
  2. Bagaimana pengorganisasian yang dilakukan dalam melaksanakan penyaluran dana bantuan sosial?
  3. Bagaimana proses pelaksanaan dalam menyalurkan dana bantuan sosial?
  4. Apakah dalam melakukan penyaluran dana bantuan sosial terdapat pengawasan?
  5. Bagaimana evaluasi yang dilakukan saat penyaluran dana bantuan sosial?
  6. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas sosial?

7. Apakah pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara efektif dan efisien?
8. Apakah pencapaian tujuan penyaluran bantuan sosial?

B. Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

1. Apakah ada peraturan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dilakukan?
2. Berapakah penerima bantuan sosial yang telah terealisasi?
3. Berapakah penerima bantuan sosial untuk masyarakat fakir miskin?
4. Berapakah penerima bantuan sosial untuk masyarakat penyandang disabilitas?
5. Berapakah penerima bantuan sosial untuk masyarakat terdampak bencana?

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.)  
NIP. 19730129 200501 1 004

(Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.)  
NIP. 19700627 200501 1 005

## SURAT PENETAPAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3693/In.39.8/PP.00.9/2021 6 September 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** (Pembimbing Utama)  
**2. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.** (Pembimbing Pendamping)

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Tri Wulandari  
NIM. : 18.2300.081  
Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **29 Juli 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL  
PEMKOT PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Dekan,

*emil*  
Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

## SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.6221/In.39.B/PP.00.9/01/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TRI WULANDARI  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 30 APRIL 2000  
NIM : 18.2300.081  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : JL. ABU BAKAR LAMBOGO, KELURAHAN UJUNG LARE,  
KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL DINAS SOSIAL  
PEMERINTAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 03 Januari 2023  
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

## SURAT IZIN PENELITIAN

	SRN IP000026
<p><b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b>  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>  <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i></p>	
<p><b>REKOMENDASI PENELITIAN</b>  <b>Nomor : 26/IP/DPM-PTSP/1/2023</b></p>	
<p>Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.          2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.          3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
<p>Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :</p>	
<p><b>M E N G I Z I N K A N</b></p>	
KEPADA NAMA	: <b>TRI WULANDARI</b>
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>
Jurusan	: <b>PERBANKAN SYARIAH</b>
ALAMAT	: <b>JL. ABU BAKAR LAMBOGO PAREPARE</b>
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: <b>EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL DINAS SOSIAL PEMERINTAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)</b>
LOKASI PENELITIAN	: <b>DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE</b>
LAMA PENELITIAN	: <b>09 Januari 2023 s.d 09 Pebruari 2023</b>
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan
Dikeluarkan di:	<b>Parepare</b>
Pada Tanggal :	<b>09 Januari 2023</b>
	<p><b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b></p> 
	<p><b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b>            Pangkat : Pembina (IV/a)            NIP : 19741013 200604 2 019</p>
<p><b>Biaya : Rp. 0.00</b></p>	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR E
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)




Balai Sertifikasi Elektronik





## SURAT SELESAI MENELITI



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS SOSIAL**  
*Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telepon (0421) 27266*  
**PAREPARE 91122**

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 450/ *LS* /Dinsos

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Dra. St. RAHMAWATI, M.Si  
 Jabatan : Sekretaris Dinas


Menyatakan bahwa :

N a m a : TRI WULANDARI  
 N I M : 18.2300.081  
 Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Judul Penelitian : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

Telah melakukan penelitian sejak tanggal 09 Januari s/d 09 Februari pada Dinas Sosial Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas  
 Sekretaris



**Dra. St. RAHMAWATI, M.Si**  
 Pembina, IV/a  
 Nip. 19650307 200212 2 002



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

**Surat Keterangan Wawancara**

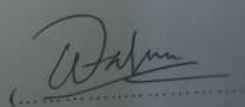
Nama : Wahidin Syanur, S. H.  
Pekerjaan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin  
Dinas Sosial Kota Parepare  
Alamat : Jl. Andi Makkulau, soreang

Menerangkan bahwa

Nama : Tri Wulandari  
Nim : 18.2300.081  
Pekerjaan : Mahasiswi Prodi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul  
"Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Parepare (Analisis Manajemen  
Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Parepare, 09 Januari 2023  
Yang Bersangkutan,  


### Surat Keterangan Wawancara

Nama : Burhanuddin, SE  
Pekerjaan : Kabid Bencana  
Dinas Sosial Kota Parepare  
Alamat : BTN, Mutiara Residence

Menerangkan bahwa

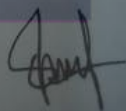
Nama : Tri Wulandari  
Nim : 18.2300.081  
Pekerjaan : Mahasiswi Prodi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Januari 2023

Yang Bersangkutan,



(.....)

### Surat Keterangan Wawancara

Nama : Hj. Heriyati  
Pekerjaan : Kepala bidang rehabilitasi sosial  
Dinas sosial kota Parepare  
Alamat : ~~Jl. Jendral Sudirman~~ Jl. Jendral Sudirman

Menerangkan bahwa


Nama : Tri Wulandari  
Nim : 18.2300.081  
Pekerjaan : Mahasiswi Prodi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka skripsi yang berjudul "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Januari 2023

Yang Bersangkutan,

  
(.....)



**Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Bapak Wahidin Syanur, S.H.)**

## SOSIAL MEDIA KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE

**Dinas Sosial Parepare**  
Dinas Sosial Kota Parepare

141 Postingan, 283 Pengikut, 296 Mengikuti

Dinas Sosial Parepare  
Layanan Publik & Pemerintahan  
Jl. Jend Sudirman No.12, Parepare, Sul-Sel, 9121  
FB : Dinas Sosial Parepare  
WA pengaduan DTKS dan PBI-JK : 081245336486 [via chat]

Tambah Teman, Kirim pesan

Diikuti oleh 1 orang  
Lihat Lainnya tentang Dinas

Teman  
2.009 (1 teman bersama)

Lihat Semua

Siti Khadijah, Milah Arifuddin, Andi Iwan Tanra, Rahman Ahmadd, Rahmawaty, Ismail

SOSIALISASI DTKS, BIDANG PERSEKUTUAN SOSIAL DAN PERMAYANAN FAKIR MUSIK, BIDANG REHABILITASI SOSIAL, BIDANG PERLINDUNGAN JAJARAN SOSIAL



## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap Tri Wulandari Lahir di Parepare, 30 April 2000, anak ketiga dari 3 bersaudara dari Pasangan Bakhtiar dan Rostiati. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2005 di TK Aisyiah 3 Kota Parepare dan selesai pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 38 Kota Parepare dan selesai pada tahun 2012, Kemudian di Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Kota Parepare dan selesai pada tahun 2015. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Penulis menyelesaikan Studi dengan skripsi berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”.